

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perekonomian Provinsi Jambi yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp83,03 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp45,19 triliun, Ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2024 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 2,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,09 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,02 persen. Ekonomi Jambi triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,32 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,04 persen, Sampai dengan triwulan III-2024, ekonomi Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,00 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,29 persen. Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III-2024 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 34,11 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,61 persen.

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan perbaikan. Pada periode triwulan III-2024 Provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi, yaitu sebesar 5,20 persen; diikuti Provinsi Aceh sebesar 5,17 persen; Sumatera Selatan tumbuh sebesar 5,04 persen; Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen; Provinsi Lampung tumbuh sebesar 4,81 persen; Provinsi Bengkulu tumbuh 4,57 persen; Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,33 persen; dan Jambi tumbuh 4,01 persen. Sementara itu, Provinsi Riau dan Kepulauan Bangka Belitung tumbuh di bawah 4 persen, masing-masing sebesar 3,46 dan 0,13 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 (y-on-y) menurut pengeluaran tumbuh sebesar 4,01 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-P sebesar 11,04 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 9,98 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 8,39 persen; Komponen PK-RT tumbuh 4,83 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 3,41 persen, sedangkan Ekspor Barang dan Jasa berkontraksi sebesar 1,00 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jambi sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,84. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 3,03 persen dengan IHK sebesar 106,36 dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 1,40 persen dengan IHK sebesar 105,54. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,76 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 2,40 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,82

persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,21 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,26 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,38 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 3,68 persen; kelompok Pendidikan sebesar 1,43 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,76 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 5,59 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,71 persen. Pada Oktober 2024, Provinsi Jambi mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,03 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,75 persen.

Identifikasi permasalahan Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah agar melakukan upaya yang optimal dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Kemendagri pada Triwulan III Tahun 2024, masih ada sejumlah daerah yang sama sekali belum melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.
 2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi perlu mewaspadaai Kondisi sejumlah pasokan komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi dan bawang merah potensi kenaikan harga menjelang Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
 3. Lebih mengaktifkan Peran TPID di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga Tim Satgas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk, agar melakukan pemantauan harga pangan setiap hari untuk mengetahui informasi penyebab terjadinya kenaikan harga.
 4. Perlunya memperbanyak kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota maupun luar Provinsi untuk mengantisipasi ketersediaan pangan.
 5. Masih ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi masih ragu atau masih takut untuk mempergunakan anggaran BTT.
 6. Perlunya implementasi digital farming pada klaster atau Gapoktan komoditas pangan strategis.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menindaklanjuti Perintah Bapak Presiden RI dan arahan dari Bapak Mendagri RI kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Bersama Mendagri RI, yang dilaksanakan seminggu sekali secara hybrid di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti rapat mingguan Mendagri RI secara hybrid, Pemerintah Provinsi Jambi menindaklanjuti rapat tersebut dengan mengadakan rapat lanjutan, hasil rapat lanjutan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya konkret guna menekan inflasi, menjaga ketersediaan bahan pokok, menjaga harga bahan pokok tidak naik dan menjaga penimbunan barang yang dilakukan oleh para pedagang dan distributor.
- b. Pemerintah Daerah memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah masing-masing. Sebab, melalui laporan IPH Pemda dapat mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga, sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

c. Beberapa kegiatan utama yang tetap harus dilakukan secara simultan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah masing-masing antara lain :

- Melaksanakan operasi pasar murah;
- Melakukan pemantauan harga secara rutin ke pasar;
- Menggalakkan gerakan menanam;
- Mengoptimalkan program pembelian beras oleh ASN;
- Mengembangkan pembuatan Toko TPID (yang menjual kebutuhan pokok masyarakat) melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- Memperluas program pemanfaatan lahan (khususnya lahan tidur) untuk usaha pertanian dan peternakan kebutuhan pokok masyarakat di daerah masing-masing;
- Meningkatkan koordinasi yang intensif pada Anggota TPID Kabupaten/Kota dan meningkatkan Kerjasama Antar Daerah khususnya antar Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi;
- Menghidupkan kembali program kampung pangan terpadu/desa mandiri pangan di daerah masing-masing; dan
- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi untuk memaksimalkan Anggaran BTT (Bantuan Tak Terduga) untuk pengendalian inflasi, baik dalam bentuk subsidi produk maupun bantuan sosial pada masyarakat.

d. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag Provinsi Jambi mengintervensi komoditas bahan pangan untuk dilakukan Operasi Pasar (OP) dalam Kota Jambi.

e. Adapun Pasar yang menjadi objek adalah Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar serta Pasar Bungur di Kabupaten Bungo, pasar-pasar tersebut merupakan lokasi pencacahan pedagang oleh BPS Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi memfasilitasi bantuan transportasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar tersebut.

f. Agar Perangkat Daerah dan Dinas Instansi terkait agar mengantisipasi faktor cuaca agar produksi setiap waktu dan internal antar wilayah tetap terjaga, bila terjadi masalah segera menghubungi Bapanas RI untuk meminta solusinya segera.

g. Melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Kepolisian, TNI, BPKP, Tim Penggerak PKK dalam mengendalikan inflasi daerah.

h. Mengadakan MOU antar daerah Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi ketersediaan pangan.

i. Menggalakkan kembali Gerakan Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN/karyawan di semua instansi pemerintah dan BUMD/BUMN lingkup Provinsi Jambi.

Adapun kegiatan pengendalian Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi di Triwulan III Tahun 2024, antara lain :

a. Pada Triwulan III 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan Bawang Merah di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (KT. Rukun Keluarga I, KT. Pasundan, KT. Melati, KT. Karya Idaman, KT. Pandan Sari, KT. Karya Muda)

b. Pada Triwulan III 2024 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi

melaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan Cabai Merah di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (KT. Bluka Mudo, KT.Berkah Tani, KT. Bakti Pertiwi, KT. Talang Baru, KT. Harapan Makmur, Gapoktan Payo Terjun Gajah, KT. Mitra Tani, KT. Maju Bersama, KT. Beringin Jaya, KT. Sri Sukomoro, KT. Maju Basamo, KT. Trisari, KT. Tunas Karya, KT. Bina Tani, KT. Air Terjun, KT. Sumber Makmur, KT. Makmur, KT. Sumber Rejo, KT. Karya Tani, KT. Pamatang Gantew, KT. Air Kilangan, KT. Baraokatul Kodiri, KT. Mulya Tani Lestari)

c. Dinas Perindag Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan operasi pasar pada tanggal 29 Juli 2024 dengan komoditi cabai rawit hijau (8 ton) dan cabai rawit merah (2 ton) yang berlokasi di Pasar Angso Duo Jambi dan Pasar Talang Banjar Jambi.

d. Dinas Perindag Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan operasi pasar pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan komoditi cabai rawit hijau (3 ton) dan cabai merah keriting (8 ton) yang berlokasi di Pasar Angso Duo Jambi dan Pasar Talang Banjar Jambi.

e. Kegiatan yang dilaksanakn Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi, antara lain :

- Pada tanggal 4 Juli 2024 melakukan kegiatan memberikan bantuan jaring 4 inchi/senangin 38 pcs bertempat di Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Pada tanggal 4 Juli 2024 melakukan kegiatan memberikan bantuan bibit ikan lele dumbo 10.000 ekor (Pokdakan Parsoan), pakan starter (benih) 300 kg (Rt.12 Kel. Teratai), Pakan Grower 600 kg (Kec. Muara Bulian) dan Viatamin C khusus untuk ikan 2/1000gr (Kab. Batanghari).
- Pada tanggal 24 Juli 2024 melakukan kegiatan memberikan bantuan Kapal Perahu Nelayan 2 unit dan Alat Tangkap Jaring Gillnet/Udang Ketak 75 Pcs bertempat di Desa Kuala Indah Kec. Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Pada tanggal 24 Juli 2024 melakukan kegiatan memberikan bantuan Kapal Perahu Nelayan 2 unit dan Alat Tangkap Jaring Gillnet/Udang Ketak 75 Pcs bertempat di Desa Sungai Tawar Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Pada tanggal 24 Juli 2024 melakukan kegiatan memberikan bantuan Alat Tangkap Jaring Gillnet/Udang Ketak 154 unit bertempat di Jl. H. Ibrahim Agani Rt. 04, Pasar Parit Deli, Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Pada tanggal 24 Juli 2024 melakukan kegiatan memberikan bantuan Kapal Perahu Nelayan 2 unit bertempat di Jl. Mawar Rt.09 Ke;. Kampung Nalayan Kec. Kuala Kuala Kab. Tanjung Jabung Barat.
- Pada tanggal 26 Juli 2024 melakukan kegiatan memberikan bantuan Perahu Nelayan Penangkap Ikan (PUD) 2 pcs bertempat di Desa Terusan Kab. Batanghari.

f. Kegiatan yang dilaksanakn Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi, antara lain :

- Pada tanggal 2 Juli 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Camat Pelayung Kota Jambi
- Pada tanggal 5-8 Juli 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah Festival Batanghari di Kota Jambi
- Pada tanggal 13 Juli 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah Aston Mendalo Darat di Kota Jambi
- Pada tanggal 23 Juli 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah di Persijam Kota Jambi
- Pada tanggal 3 Agustus 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam

rangka HUT TVRI Jambi ke 62 di Kota Jambi

- Pada tanggal 8 Agustus 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Mandiri JALUKO di Kota Jambi
- Pada tanggal 24 Agustus 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka HUT RI ke 79 di Kota Jambi
- Pada tanggal 28 Agustus 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah Mandiri di Gentala Arasy di Kota Jambi
- Pada tanggal 4 September 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah Mandiri di Perbatasan Kota Jambi dan Muara Jambi (Desa Muara Jernih Kec. Mestong)
- Pada tanggal 14 September 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah Mandiri Integrasi Kios Pangan di Tempino Perbatasan Kabupaten Muara Jambi
- Pada tanggal 16 September 2024 melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia ke 44 bertempat di Perumnas Aur Duri Kel. Aur Duri Kec. Telanaipura Kota Jambi

g. Kegiatan yang dilaksanakn Kanwil Perum Bulog Jambi dalam pengendalian inflasi, antara lain:

- Pada tanggal 3 Oktober 2024 melaksanakan kegitan operasi pasar berupa (1) Beras SPHO 1.000kg; (2) Beras Premium 500kg; (3) Gula 100kg; (4) Tepung 50kg; (5) Minyak Goreng 120 liter yang bertempat Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- Pada tanggal 7 Oktober 2024 melaksanakan kegitan operasi pasar berupa (1) Beras SPHO 1.000kg; (2) Beras Premium 500kg; (3) Gula 100kg; (4) Tepung 50kg; (5) Minyak Goreng 120 liter yang bertempat di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.
- Pada tanggal 10 Oktober 2024 melaksanakan kegitan operasi pasar berupa (1) Beras SPHO 1.000kg; (2) Beras Premium 500kg; (3) Gula 100kg; (4) Tepung 50kg; (5) Minyak Goreng 120 liter yang bertempat di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- Pada tanggal 10 Oktober 2024 melaksanakan kegitan Gerakan Pangan Murah (GPM) berupa (1) Beras SPHO 1.000kg; (2) Beras Premium 500kg; (3) Gula 100kg; (4) Tepung 50kg; (5) Minyak Goreng 120 liter yang bertempat di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- Pada tanggal 16 Oktober 2024 melaksanakan kegitan operasi pasar berupa (1) Beras SPHO 1.000kg; (2) Beras Premium 500kg; (3) Gula 100kg; (4) Tepung 50kg; (5) Minyak Goreng 120 liter yang bertempat di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- Pada tanggal 21 Oktober 2024 melaksanakan kegitan operasi pasar berupa (1) Beras SPHO 1.000kg; (2) Beras Premium 500kg; (3) Gula 100kg; (4) Tepung 50kg; (5) Minyak Goreng 120 liter yang bertempat di Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi.

h. TPID Provinsi Jambi aktif mengikuti rapat mingguan bersama Menteri Dalam Negeri RI mengenai Pengendalian Inflasi Daerah.

i. Pada tanggal 2 September 2024 TPID Provinsi Jambi melasanakan Rapat Koordinas Pengendalian Inflasi Daerah, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Anggota TPID Provinsi Jambi dan TPID Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam rangka Audiensi Konsep Pengembangan Lahan Horti Abadi (Lahtiba).

j. Pada tanggal 17 September 2024 TPID Provinsi Jambi melaksanakan kegitan High Level Meeting (HLM) Semester II Tahun 2024 yang dipimpin oleh Bapak H. Abdullah Sani, M.Pd.I. (Wakil Gubernur Jambi) kegiatan tersebut dilaksanakan di Swissbel Hotel Jambi diikuti oleh Forkopimda Provinsi Jambi serta Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi dengan tema Penguatan

Inovasi Ketersediaan Pasokan Pangan Strategis untuk Mendukung Sustainability Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi.

k. Tanggal 18 September 2024 TPID Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bertempat di Ruang Rapat Dinas TPHP Provinsi Jambi, yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Anggota TPID Provinsi Jambi dan Anggota TPID Kota Jambi dalam rangka Rapat Pemantapan Pengembangan Lahan Horti Abadi (Lahtiba).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi atau antar Provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis, MOU yang sudah disepakati perlu ditindaklanjuti dengan Kerjasama Antar Daerah agar kegiatan yang akan dilaksanakan terealisasi dengan efektif.
2. Dalam pembangunan BUMD Pangan di daerah diperlukan dukungan yang kuat dari Kepala Daerah. Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, maka diperlukan pembentukan BUMD Pangan mengingat Peran BUMD pangan sangat penting sebagai *off taker* hasil pangan lokal, sehingga dapat menjaga pasokan serta harga di tingkat petani dan masyarakat.
3. Dalam pelaporan TPID Award, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi harus konsisten dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sejalan dengan roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun. Selanjutnya, perlu memunculkan aspek inovasi dan digitalisasi dalam perumusan program unggulan.
4. Memperkuat peran dan fungsi TPID Provinsi Jambi sebagai media potensial dalam mengendalikan inflasi sepanjang Tahun 2024 dengan melakukan penguatan kelembagaan TPID, bekerjasama dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi serta instansi terkait dalam peningkatan produksi, efisiensi rantai tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana/prasaran penunjang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya meningkatkan Peran aktif TPID Provinsi dalam pembinaan kelembagaan TPID Kab/Kota di Provinsi Jambi sangat strategis dalam mendukung pengendalian inflasi provinsi maupun nasional;
2. Pentingnya Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dengan cukup signifikan karena berpotensi merugikan produsen seperti petani dan peternak, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi komoditas pangan.
3. Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk membantu petani mencari langkah antisipasi sehingga produksi komoditas pertanian/pangan tetap dapat dilakukan.

a. Dalam jangka pendek :

Menyusun data neraca pangan Provinsi Jambi sebagai dasar pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Perindag dan Bulog Provinsi Jambi dalam melaksanakan Operasi pasar dan Pasar Murah dalam rangka menjaga stabilitasi harga bahan pokok pada bulan Januari s.d Desember 2024.
3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar kota/kabupaten di Provinsi Jambi atau antar provinsi sebagai salah satu upaya memenuhi ketersediaan bahan pangan strategis.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perlindungan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu terdampak inflasi. APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi, sehingga APBD harus tersalurkan tepat waktu termasuk pemberian bantuan sosial dan dana insentif lainnya.
5. Meningkatkan sinergi Pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi (Rakor) TPID berkala, serta meningkatkan sinergi dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk tahun 2024, telah dilaksanakan GNPIP bersamaan dengan Pekan Nasional Qris di Hotel Aston Kota Jambi, antara lain dengan menggiatkan gerakan pemberian modal bagi pengusaha/UMKM yang bergerak dibidang budidaya cabai, timun, bawang merah, sawi, kangkung, kol dan lain-lain juga pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar (bekerjasama dengan Bank Indonesia).
6. Pemerintah kota/kabupaten perlu meningkatkan proses digitalisasi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
7. Mengevaluasi Program Unggulan (output) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang didukung oleh TPID Provinsi Jambi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi sehingga secara efektif menjaga capaian inflasi pada level rendah dan stabil, tepat sasaran dalam menyelesaikan problem inflasi daerah serta berada pada track yang sesuai dalam upaya Pengendalian Inflasi daerah.
8. TPID Provinsi Jambi dan instansi terkait terus mengadakan rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan pada hari senin yang bertujuan untuk mengevaluasi komoditas yang menyumbang kenaikan inflasi dan mencari solusi terbaik.

b. Dalam jangka menengah/panjang :

1. Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Pengendalian Inflasi :
 - Monitoring dan evaluasi dan Pengawasan implementasi KAD agar tidak hanya berhenti dengan penandatangan MoU dan PKS.
 - Mendorong Fasilitasi Kerjasama secara Business to Business (B2B), tidak hanya Government to Government (G2G)
 - Mendorong peran BUMD Pangan dalam Pelaksanaan KAD, baik untuk pemenuhan kebutuhan di daerah maupun pendistribusian ke daerah lain.
 2. Kebijakan *extra effort* masih dilanjutkan sampai akhir tahun 2024 guna menekan laju inflasi kembali ke rentang target sasaran;
 3. Tersedianya data merupakan hal yang strategis guna mendukung kebijakan pengendalian harga pangan strategis dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional sehingga perlu sinergi data dan informasi pangan antar lembaga dan/atau daerah yang mencakup harga, pasokan, dan jadwal panen;
 4. Pemanfaatan data produksi pertanian sebagai identifikasi potensi KAD karena mayoritas produksi komoditas pangan masih terfokus di wilayah Indonesia bagian Barat terutama Pulau Jawa, sehingga ketersediaan pasokan antar waktu dan antar wilayah masih
- 1.

menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan;

5. Melaksanakan aktifitas sesuai dengan peta pangan strategis yang mengindikasikan posisi surplus dan devisa Provinsi Jambi, berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi Jambi.
6. Mengimplementasikan Peta Jalan (ROADMAP) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024, untuk menjaga Inflasi di daerah;
7. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi produk pangan lokal;
8. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama; dan
9. Melakukan manajemen persediaan untuk menghadapi lonjakan harga komoditas hortikultura dengan penyediaan mesin pengawet atau *cold storage*.